

LAPORAN TESIS

**PENGATURAN KOMPETENSI DAN KEWENANGAN
PROFESIONAL DOKTER GIGI UMUM DAN DOKTER GIGI
SPESIALIS BERBASIS KEADILAN**



RUSMIATI
NIM: 22.C2.0057

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Tenaga Medis dokter gigi adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Perbandingan jumlah tenaga medis dokter gigi spesialis yang hanya 10% dari jumlah tenaga medis dokter gigi umum dengan penyebaran dokter gigi spesialis yang tidak merata menjadi tugas Negara melalui Kementerian Kesehatan melakukan transformasi SDM kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis dan kapasitas SDM kesehatan yang memiliki tujuan agar terpenuhinya SDM kesehatan yang berkompeten dan berkeadilan.

Penelitian ini membahas tentang pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan profesional dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis di Indonesia, apakah sudah berlandaskan asas keadilan agar dokter gigi umum dan/atau dokter gigi spesialis dalam melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan tenaga medis dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis di Indonesia apakah telah berlandaskan keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, dengan sifat penelitian *prespective design*, sebagai variabel terdiri dari norma yang mengatur Kompetensi dan Kewenangan profesional dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis serta Asas Keadilan, jenis data yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diambil melalui studi Pustaka dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa kompetensi dan kewenangan merupakan dua hal yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lainnya seperti halnya sertifikat kompetensi yang tidak dapat dipisahkan dengan standar profesi. Sertifikat kompetensi diberikan kepada dokter gigi yang telah kompeten dalam melaksanakan tindakan layanan kedokteran gigi dan mulut. Standar profesi merupakan bentuk kewenangan yang diberikan Negara kepada dokter gigi dalam bentuk STR untuk menjalankan praktik kedokteran gigi dan mulut. Kewenangan diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan profesional dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis di Indonesia telah berlandaskan asas keadilan meskipun timbulnya keadilan subyektif dan adanya tumpang tindih standar kompetensi dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis.

Kata Kunci: Kompetensi, Kewenangan, Dokter gigi umum, Dokter gigi spesialis, Asas keadilan

ABSTRACT

Dentist Medical Personnel are any person who devotes themselves to the health field and has a professional attitude, knowledge, and skills through dental professional education that requires the authority to carry out health efforts. Comparing the number of specialist dentist medical personnel, which is only 10% of the number of general dentist medical personnel, with the uneven distribution of specialist dentists, is the task of the State through the Ministry of Health to transform health human resources in order to ensure the availability and equitable distribution of the number, type and capacity of health human resources which have the goal of fulfilling competent and equitable health human resources.

This study discusses the regulation of competencies and the granting of professional authority of general dentists and specialist dentists in Indonesia, whether it is based on the principle of justice so that general dentists and/or specialist dentists in carrying out dental and oral practice in accordance with their authority and competence.

This study aims to know and analyze the regulation of competencies and the granting of authority of medical personnel of general dentists and specialist dentists in Indonesia whether it is based on justice. By using normative juridical research methods through the *statute approach* and *conceptual approach*, with the nature of perspective *design research*, as a variable consisting of norms that regulate the professional competence and authority of general dentists and specialist dentists as well as the Principle of Justice, the types of data used primary, secondary and tertiary legal materials taken through literature studies and analyzed in a Qualitative.

The result of this study is that competence and authority are two different things but complement each other just like a certificate of competence that cannot be separated from professional standards. Certificates of competence are given to dentists who have been competent in carrying out dental and oral services. Professional standards are a form of authority given by the State to dentists in the form of STR to carry out dental and oral medicine practices. Authority is given in accordance with the competence it has. The regulation of competence and the granting of professional authority of general dentists and specialist dentists in Indonesia has been based on the principle of justice despite the emergence of subjective justice and the overlap of competency standards for general dentists and specialist dentists.

Keywords: Competence, Authority, General dentist, Specialist dentist, Principle of justice